

**ANALISIS PENGARUH KINERJA DAN KARAKTERISTIK PEMDA
TERHADAP PENGUNGKAPAN INFORMASI KEUANGAN DALAM
WEBSITE PEMDA
(Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2012-
2014)**

Muhammad Hadis
Jurusan Akuntansi Program S1
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang
Email : hadismuhammad3@gmail.com

Abstract

Financial information disclosure is the activity of reporting information about finance that is useful in evaluating the performance of the organization and can assist in making appropriate decisions for users of financial statements.

The purpose of this study is to see how big the influence of Local Revenue (PAD), size of the local government, complexity of government, and local purchase on local government on the disclosure of financial information on the website of local government District / City in West Sumatra 2012-2014. The data used in this research is secondary data in the form of Financial Report of Regency / City Government in West Sumatra Province year 2012-2014 with sampling using total sample technique. The analysis used in this research is logistic regression analysis because the dependent variable is measured by dummy variable. The results of this study indicate that the variable of Original Regional Income (PAD) and the size of local government influence the disclosure of financial information on the local government website. While the variables of government complexity and regional expenditure do not have an effect on the disclosure of financial information on the LG website.

Keywords: *Transparency, Local Original Income (PAD), Size, Complexity, Purchase.*

Abstrak

Pengungkapan informasi keuangan yaitu kegiatan melaporkan informasi tentang keuangan yang bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja organisasi dan dapat membantu dalam membuat keputusan yang tepat bagi pengguna laporan keuangan.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), ukuran pemerintah daerah, kompleksitas pemerintahan, dan belanja daerah terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2012–2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera

Barat tahun 2012–2014 dengan pengambilan sampel menggunakan teknik total sampel. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi logistik karena variabel dependent diukur dengan variabel dummy. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* Pemda. Sementara variabel kompleksitas pemerintah dan belanja daerah tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* Pemda.

Kata kunci: Transparansi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Ukuran, Kompleksitas, Belanja.

Pendahuluan

Transparansi laporan keuangan mulai mendapatkan perhatian khusus di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Pemerintah mulai menerapkan keterbukaan terhadap informasi publik dalam memenuhi kewajibannya sebagai pemegang amanat rakyat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui apa yang sedang dan akan dikerjakan oleh pemerintah dan bagaimana pemerintah menggunakan anggaran dana yang ada untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Untuk itu pemerintah menganjurkan kepada seluruh pejabat publik agar lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya yakni dengan cara menyebarkan informasi publik

kepada masyarakat, baik informasi keuangan maupun nonkeuangan. Hal ini sesuai dengan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan diperkuat dengan Instruksi Mendagri nomor 188.52/1797/SJ tahun 2012 tentang kualitas pelaporan informasi keuangan. Dalam memenuhi kewajiban tersebut, pemerintah daerah dapat menggunakan internet sebagai media dalam melaporkan informasi keuangannya karena internet dinilai sangat mudah dijangkau oleh masyarakat dan juga memiliki biaya yang lebih rendah.

Namun, kenyataan yang ditemui dilapangan, mayoritas Pemda belum mentaati peraturan tersebut sepenuhnya. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) telah melakukan

survey pada September 2013, dimana hasil temuan survey ini mengatakan bahwa masih banyak Pemda yang belum melaporkan informasi keuangannya di internet, khususnya di *website* resmi yang dikelola oleh masing-masing Pemda. Survei ini diperkuat oleh Penelitian Agustin (2014) yang menemukan bahwa mayoritas pemkab/pemkot di propinsi Sumatera Barat masih belum memanfaatkan website resmi pemda untuk mempublikasikan 12 item dokumen terkait pengelolaan anggaran secara lengkap dan konsisten.

Selain itu, menurut laporan *Corruption Perceptions Index 2015*, Indonesia juga baru menempati peringkat ke-88 dari total 168 negara yang diukur, dimana Indonesia hanya memiliki skor sebesar 36 dari 100 poin maksimum (*Transparency International*, 2016). Hal ini membuktikan bahwa terdapat banyak faktor yang memengaruhi pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemda.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemda. Pada penelitian ini, peneliti mengambil beberapa variabel yang diduga memiliki pengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemda, diantaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD), ukuran pemerintah daerah, kompleksitas pemerintahan, dan belanja daerah. Pada penelitian ini

sampel yang dipakai berupa data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ada di Sumatera Barat Tahun 2012-2014.

Dari penjelasan diatas, peneliti mencoba merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* Pemda?
2. Apakah ukuran Pemda berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* Pemda?
3. Apakah kompleksitas pemerintah berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* Pemda?
4. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* Pemda?

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemda.

2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemda.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompleksitas pemerintah daerah terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemda, dan
4. Untuk mengetahui pengaruh belanja daerah terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemda.

Berikut adalah penjelasan mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yang kemudian akan dijadikan sebagai hipotesis penelitian. Kinerja pemerintah daerah dapat diukur dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar PAD maka kinerja pemerintah daerah semakin baik, begitu pula sebaliknya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sering mendapat perhatian yang lebih dalam pengelolaan keuangan daerah karena PAD memiliki tingkat material yang tinggi, sehingga pemerintah daerah lebih memilih untuk membatasi informasi mengenai seberapa besar

Pendapatan Asli Daerah berkontribusi dalam memakmurkan dan mensejahterakan masyarakatnya. Laswad et.al (2005) dan Medina (2012) menemukan dalam penelitiannya bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet.

Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* Pemda.

Besar atau kecil ukuran pemerintah daerah dapat dilihat dari total aset yang dimiliki oleh daerah tersebut. Semakin besar jumlah aset suatu daerah maka semakin besar pula informasi keuangan yang harus dilaporkan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi kesalahpahaman informasi oleh masyarakat terhadap pemerintah daerahnya sendiri. Tekanan seperti ini dapat memberikan dorongan kepada pemerintah daerah untuk lebih transparan dan terbuka mengenai informasi-informasi daerah terutama

yang berkaitan dengan keuangan. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan dapat menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dengan cara melaporkan informasi, baik informasi keuangan maupun non-keuangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rora (2010), Medina (2012), dan Trisnawati dan Komarudin (2014) menunjukkan bahwa adanya pengaruh kompleksitas pemerintahan terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2 : Ukuran Pemerintah Daerah memiliki pengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* Pemda.

Kompleksitas pemerintahan dapat dilihat dari jumlah penduduk disuatu daerah tertentu. Semakin banyak jumlah penduduk atau populasi suatu daerah maka dapat dikatakan daerah tersebut lebih kompleks. Suatu daerah yang memiliki penduduk yang beragam, baik dari segi umur, jenis kelamin,

pekerjaan, latar belakang pendidikan, dan lain-lain akan memiliki tingkat kebutuhan informasi dan pengetahuan yang berbeda-beda. Untuk itu pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi dan menjawab semua pertanyaan dan keingintahuan masyarakat yang berkaitan dengan pemerintahan agar mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakatnya, salah satunya mengenai informasi keuangan daerah. Untuk itu pemerintah daerah akan terdorong untuk menyebarkan informasi publik dengan cara memanfaatkan *website* sebagai media penyampaian informasi yang lebih mudah dan efisien. Penelitian yang dilakukan oleh Rora (2010) dan Hilmi (2010) juga menunjukkan bahwa kompleksitas pemerintahan berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3 : Kompleksitas Pemerintah Daerah memiliki pengaruh terhadap

pengungkapan informasi keuangan pada *website* Pemda.

Baelanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat dalam membantu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Belanja daerah digunakan untuk meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam segala bidang, seperti bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain sebagainya. Suatu daerah yang memiliki belanja daerah yang tinggi, otomatis daerah tersebut juga memiliki tingkat pelayanan yang baik, terutama dalam segi informasi. Pemerintah daerah akan memanfaatkan media elektronik dalam menyebarkan informasi pemerintahan, termasuk informasi keuangan pemerintah daerah itu sendiri. Media elektronik yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam menyebarkan informasi publik salah satunya yaitu *website* pemda. Semua informasi yang berkaitan dengan pemerintahan akan dimasukkan kedalam *website* agar masyarakat dapat dengan mudah

untuk mengetahui dan menilai kinerja pemerintahan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rora (2010) dan Christina (2013) menunjukkan bahwa adanya pengaruh belanja daerah terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H4 : Belanja Daerah memiliki berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemda.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2014. Data kuantitatif ini berupa data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari bukti, catatan, ataupun laporan dokumen historis yang telah dipublikasikan. Ada dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel dependen yang berupa pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemda dan variabel

independen yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), ukuran pemerintah daerah, kompleksitas pemerintahan, dan belanja daerah yang diduga memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Sumber data yaitu laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2012-2014 diperoleh dari Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Badan Pusat Statistik, dan *website* resmi masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang terdiri dari 19 kabupaten/kota, sehingga teknik pengambilan sampel yang digunakan disebut dengan teknik total sampling. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi logistik karena variabel dependennya berupa pengungkapan informasi keuangan diukur menggunakan variabel dummy, jika pemerintah daerah

melaporkan salah satu informasi keuangannya maka diberi skor 1, sementara daerah yang tidak melaporkan informasi keuangannya diberi skor 0. Berikut adalah persamaan model regresi yang digunakan pada penelitian ini:

$$IKD = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 KOMP + \beta_3 SIZE + \beta_4 BD + e$$

Hasil dan Pembahasan

Statistik deskriptif memberikan gambaran yang cukup bermanfaat dalam melakukan analisa permasalahan. Rangkuman statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 1. Dari hasil penelitian didapatkan nilai minimum pengungkapan informasi keuangan (IKD) dari 57 data yaitu sebesar 0 sementara nilai maksimum sebesar 1. Nilai rata-rata (*mean*) pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah sebesar 0,51 dengan nilai deviasi standar 0,506. Untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 57 data, nilai minimum sebesar 3,11 dan nilai maksimum sebesar 16,47. Sementara nilai rata-rata (*mean*) PAD adalah sebesar 6,69. Variabel ukuran pemerintah daerah (LnSIZE) dari 57 data adalah sebesar 20,33 dan nilai

maksimum adalah sebesar 22,79. Nilai rata-rata (*mean*) ukuran pemerintah adalah sebesar 21,12. Selanjutnya variabel kompleksitas pemerintah daerah (LnKOMP) nilai minimum dari 57 data adalah sebesar

10,79 dan nilai maksimum adalah sebesar 13,70. Nilai rata-rata (*mean*) kompleksitas pemerintah daerah sebesar 12,20. Selanjutnya variabel belanja daerah (LnBD)

Tabel 1. *Descriptive Statistics*

	N	Minimum	Maximum	Mean
IKD	57	0	1	.51
PAD	57	3.11	16.47	6.69
LnSIZE	57	20.33	22.79	21.12
LnKOMP	57	10.79	13.70	12.20
LnBD	57	19.68	22.69	20.39

Valid N (listwise)

nilai minimum dari 57 data adalah sebesar 19,68 dan nilai maksimum adalah sebesar 22,69. Nilai rata-rata (*mean*) belanja daerah (LnBD) sebesar 20,39.

Hasil Uji Analisis Regresi Logistik

a. Uji *Hosmer and Lemeshow's Test*

Langkah awal untuk mengetahui bahwa suatu model

regresi logistic merupakan model yang tepat, terlebih dahulu akan dilihat bentuk kecocokan dan kelayakan model secara keseluruhan. Dalam hal ini digunakan uji *Hosmer and Lemeshow's Test*. Output pada uji *Hosmer And Lemeshow's Test* dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 8. Uji *Hosmer And Lemeshow's Test*

Hosmer and Lemeshow Test			
Step	Chi-square	Df	Sig.
1	3.269	8	.916

Dari hasil pengujian, diperoleh nilai Chi Square sebesar 3,269 dengan nilai Sig. sebesar 0,916. Dari hasil tersebut terlihat bahwa nilai Sig. lebih besar dari nilai Sig. Alpha ($0,916 > 0,05$), artinya tidak ada perbedaan nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati. Hal ini berarti model regresi logistik layak dipakai untuk analisis selanjutnya.

b. Uji -2 Log Likelihood Value (nilai -2LL)

Selanjutnya untuk menilai keseluruhan model (*overall model fit*) digunakan statistic *-2 Log Likelihood*. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai -2LL pada saat *Block Number = 0 (Beginning Block)* dengan *Block Number = 1*. Berikut table uji *-2 Log Likelihood*.

**Tabel 9. Uji -2 Log Likelihood Value
Block Number = 0 (Beginning Block)**

Iteration History^{a,b,c}

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients
			Constant
Step 0	1	78.861	-.105
	2	78.861	-.105

a. Constant is included in the model.

b. Initial -2 Log Likelihood: 78.861

c. Estimation terminated at iteration number 2 because parameter estimates changed by less than .001.

Tabel 10. Uji -2 Log Likelihood Value

Block 1 : Method = Enter

Iteration History^{a,b,c,d}

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients				
			Constant	PAD	SIZE	KOMP	BD
Step 1	1	60.036	-47.697	.139	1.611	-.255	.772
	2	53.697	-80.169	.352	2.756	-.027	.983
	3	52.270	-105.024	.512	3.499	.053	1.339
	4	52.170	-114.709	.560	3.685	-.008	1.646
	5	52.169	-116.081	.565	3.698	-.024	1.707

6	52.169	-116.107	.565	3.698	-.024	1.709
7	52.169	-116.107	.565	3.698	-.024	1.709

a. Method: Enter

b. Constant is included in the model.

c. Initial -2 Log Likelihood: 78.861

d. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than .001.

Dilihat pada Tabel 9 pada Block Number = 0 (Beginning Block), model pertama hanya dengan konstanta tanpa adanya variable bebas diperoleh nilai -2 Log Likelihood sebesar 78,861. Sedangkan pada Tabel 10, Block Number = 1 model memasukkan konstanta dan variable bebas dengan nilai 52,169.

Berdasarkan Tabel 9 dan Tabel 10 diatas, menunjukkan bahwa Block Number 0 sebesar 78,861 dan pada Block Number 1 nilai mengalami penurunan menjadi

52,169. Penurunan ini menunjukkan model regresi baik untuk digunakan.

c. Uji Koefisien Regresi

Pengujian koefisien regresi dilakukan untuk menguji seberapa besar semua variable bebas yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh terhadap variable terikat. Koefisien regresi dapat ditentukan dengan membandingkan nilai probabilitas (Sig.) dengan tingkat Signifikansi alpha (α) sebesar 0,05. Berikut table hasil analisisnya.

Tabel 11. Uji Koefisien Regresi

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	Sig.	Keterangan	
Step 1 ^a PAD	0.565	0.220	6.594	0.010	Signifikan	H1 diterima
SIZE	3.698	1.362	7.369	0.007	Signifikan	H2 diterima
KOMP	-0.024	0.812	0.001	0.976	Tidak Signifikan	H3 ditolak
BD	1.709	1.754	0.949	0.330	Tidak Signifikan	H4 ditolak
Constant	-116.107	40.373	8.271	0.004	-	-

a. Variable(s) entered on step 1: PAD, SIZE, KOMP, BD.

Dari tabel output diatas, dapat dilihat pada nilai Sig. variable bebas,

variable PAD dan variable SIZE berpengaruh signifikan terhadap

variable IKD dengan nilai Sig. sebesar 0,010 untuk variabel PAD dan sebesar 0,007 untuk variable SIZE menunjukkan kecil dari α 0,05, sedangkan pada variable KOMP dan Variabel BD menunjukkan nilai Sig. diatas α 0,05, yaitu 0,976 dan 0,330, hasil ini mengindikasikan bahwa variable KOMP dan variable BD bukan yang mempengaruhi probabilitas pengungkapan informasi keuangan di website pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat.

Dari Tabel 11 juga dapat digunakan sebagai penyusunan model persamaan regresi logistic, adalah sebagai berikut.

$$\text{IKD} = -116,107 + 0,565 \text{ PAD} + 3,698 \text{ SIZE} - 0,024 \text{ KOMP} + 1,709 \text{ BD} + \mu$$

Estimasi parameter β yang digunakan dalam persamaan diatas untuk mengukur sejauh mana variable independent mampu meningkatkan log probabilitas suatu event terjadi. Berikut penjelasan angka yang dihasilkan dari persamaan logistic diatas.

1) Konstanta (a)

Dari hasil uji analisis regresi logistic terlihat bahwa konstanta

sebesar -116,107 menunjukkan jika tidak ada variable bebas, Variabel PAD, SIZE, KOMP, BD, maka pengungkapan informasi keuangan di website pemerintah daerah belum ada sebesar 116,107.

2) Koefisien regresi (β_1) PAD

Koefisien regresi dari variable pendapatan asli daerah (PAD) adalah sebesar 0,565, artinya jika variable pendapatan asli daerah (PAD) meningkat satu satuan maka probabilitas pengungkapan informasi keuangan di *website* pemerintah daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,565 satuan, dengan syarat/asumsi variable bebas lainnya tetap.

3) Koefisien regresi (β_2) SIZE

Koefisien regresi dari variable ukuran pemerintah (SIZE) adalah sebesar 3,698, artinya jika variable ukuran pemerintah (SIZE) meningkat satu satuan maka probabilitas pengungkapan informasi keuangan di *website* pemerintah daerah akan mengalami peningkatan sebesar 3,698 satuan, dengan syarat/asumsi variable bebas lainnya tetap.

4) Koefisien regresi (β_3) KOMP

Koefisien regresi dari variable kompleksitas pemerintahan (KOMP) adalah sebesar -0,024, artinya jika variable kompleksitas pemerintahan (KOMP) meningkat satu satuan maka probabilitas pengungkapan informasi keuangan di *website* pemerintah daerah akan mengalami penurunan sebesar 0,024 satuan, dengan syarat/asumsi variable bebas lainnya tetap.

5) Koefisien regresi (β_4) BD

Koefisien regresi dari variable belanja daerah (BD) adalah

sebesar 1,709, artinya jika variable belanja daerah (BD) meningkat satu satuan maka probabilitas pengungkapan informasi keuangan di *website* pemerintah daerah akan mengalami peningkatan sebesar 1,709 satuan, dengan syarat/asumsi variable bebas lainnya tetap.

d. Matriks Kualifikasi

Matriks kualifikasi akan menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi kemungkinan suatu pemerintah daerah mengungkapkan informasi keuangan di *website* resminya.

Tabel 12. Matriks Kualifikasi

Classification Table^a

Observed			Predicted		
			Pengungkapan Informasi Keuangan di Website		Percentage Correct
			Tidak melaporkan	Melaporkan	
Step 1	Pengungkapan Informasi Keuangan di Website	Tidak melaporkan	25	5	83.3
		Melaporkan	7	20	74.1
Overall Percentage					78.9

a. The cut value is .500

Pada table diatas menunjukkan observasi yang sesungguhnya. Menurut prediksi, pemerintah daerah yang mengungkapkan informasi keuangan

di website adalah 27 pemerintah daerah selama 3 tahun, sedangkan observasi sesungguhnya menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang mengungkapkan

informasi keuangan di website adalah sebanyak 20 pemerintah daerah. Maka ketetapan model ini adalah 20/27 atau 74,1%. Dan menurut prediksi pemerintah daerah yang tidak mengungkapkan informasi keuangan di website adalah 30 pemerintah daerah selama 3 tahun, sedangkan observasi sesungguhnya menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang tidak mengungkapkan informasi keuangan di website adalah sebanyak 25

pemerintah daerah. Maka ketetapan model ini adalah 25/30 atau 83,3%

e. Uji Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabilitas variable-variabel independent mampu memperjelas variabilitas variable dependent. Nilai ini dapat dilihat dari tabel output SPSS 18 berikut, sebagai hasil dari perhitungan analisis regresi logistik pada program SPSS 18.

Tabel 13. Koefisien Determinasi

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	52.169 ^a	.374	.499

a. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than .001.

Pada table diatas menunjukkan nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,499, yang berarti pengaruh semua variable independent terhadap variable dependen adalah sebesar 49,9%, sedangkan sisanya 50,1% dijelaskan oleh variable lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Dan secara keseluruhan variable pendapatan asli daerah (PAD), ukuran pemerintah

(SIZE), kompleksitas pemerintahan (KOMP) dan belanja daerah (BD) dapat menjelaskan prediksi pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah sebesar 49,9%.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengungkapan informasi keuangan di website pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil olahan statistik dalam penelitian ini yang

menyatakan bahwa hipotesis 1 diterima, yang melalui pengujian analisis regresi logistic, didapat adanya pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap pengungkapan informasi keuangan di website pemerintah daerah.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi maka pengungkapan informasi keuangan juga semakin meningkat. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah yang memiliki kinerja yang baik akan semakin terdorong untuk melakukan pengungkapan informasi keuangannya di *website*, agar memperoleh dukungan dari masyarakat. Masyarakat akan menilai bahwa pemerintah daerah telah bekerja dengan baik dalam memaksimalkan pendapatan daerahnya. Dengan demikian, seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah akan berjalan dengan baik dan masyarakat juga akan turut membantu kesuksesan kegiatan tersebut, karena masyarakat percaya kepada pemerintah daerahnya dalam

melaksanakan amanah yang diberikan untuk tujuan memajukan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Untuk itu, dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, Pemerintah daerah akan memanfaatkan *website* resminya sebagai media penyampaian informasi yang lebih efektif dan efisien.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Rahman dkk., (2013) dan penelitian Trisnawati dan Komarudin (2014), dimana dari hasil penelitiannya juga mengatakan bahwa PAD yang tinggi akan mendorong pemerintah daerah untuk mengungkapkan informasi keuangannya kepada masyarakat melalui internet, khususnya *website* resmi yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Pengaruh Ukuran Pemerintah (SIZE) terhadap pengungkapan informasi keuangan di *website* pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil olahan statistik dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa hipotesis 2 diterima, yang melalui pengujian analisis regresi logistic, didapat

adanya pengaruh yang signifikan positif antara ukuran pemerintah daerah terhadap pengungkapan informasi keuangan di *website* pemerintah daerah. Hal ini berarti jika variabel ukuran pemerintah daerah meningkat maka profitabilitas pengungkapan informasi keuangan di *website* pemerintah daerah juga mengalami peningkatan.

Pemerintah daerah yang memiliki aset yang besar akan memiliki pengawasan yang ketat dan kebutuhan untuk melaporkan informasi keuangannya juga akan semakin meningkat. Ukuran pemda yang besar akan mendorong pemda tersebut untuk mempublikasikan laporan keuangannya. Kepala daerah akan memanfaatkan *website* sebagai media pelaporan karena memiliki banyak keuntungan, seperti kemudahan, kecepatan akses, dan juga biaya yang sangat murah untuk memenuhi kewajibannya dalam hal transparansi atau keterbukaan informasi publik.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rora (2010), Medina (2012), serta Trisnawati dan

Komarudin (2014). Dimana hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki ukuran yang besar akan lebih cenderung mengungkapkan informasi keuangannya kepada masyarakat.

Pengaruh Kompleksitas Pemerintahan (KOMP) terhadap pengungkapan informasi keuangan di *website* pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil olahan statistik dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa hipotesis 3 ditolak, yang melalui pengujian analisis regresi logistic, didapat tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kompleksitas pemerintahan terhadap pengungkapan informasi keuangan di *website* pemerintah daerah.

Dari hasil penelitian yang didapatkan, dapat diartikan bahwa kompleksitas pemerintahan yang digambarkan dengan jumlah populasi daerah yang memiliki tingkat keberagaman yang tinggi tidak menjamin bahwa masyarakat akan lebih peduli dengan urusan pemerintahan, sehingga pemerintah daerah juga tidak termotivasi untuk

meningkatkan pengungkapan informasi keuangannya di internet, khususnya disitus resmi pemerintah daerah. Dimana hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang mengatakan kompleksitas pemerintahan yang tinggi akan memberikan dorongan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pengungkapan laporan keuangannya (Ingram, 1984 dalam Rora dan Dwi, 2012).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmad dan Haryanto (2013) yang menyatakan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangannya di *website*. Adanya ketidakkonsistenan ini mengindikasikan bahwa kompleksitas pemerintahan bukan menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi keuangan di *website* pemerintah daerah.

Pengaruh Belanja Daerah (BD) terhadap pengungkapan informasi keuangan di *website* pemerintah daerah

Berdasarkan hasil olahan statistik dalam penelitian ini yang

menyatakan bahwa hipotesis 4 ditolak, yang melalui pengujian analisis regresi logistic, didapat tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara belanja daerah terhadap pengungkapan informasi keuangan di *website* pemerintah daerah.

Dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa belanja daerah yang tinggi tidak menggambarkan tingginya tingkat pelayanan atas informasi keuangan daerah yang dilaporkan dalam *website* milik pemda. Hal ini kemungkinan disebabkan karena pemda tidak terlalu mengutamakan pelayanan informasi dan cenderung lebih membatasi akses terhadap informasi keuangan di *website*. Sehingga situs resmi yang dimiliki pemda belum sepenuhnya dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan dan arahan oleh pemerintah pusat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rora dan Dwi (2012) yang menyatakan belanja daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemda. Namun, hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian yang

dilakukan kadek dkk.,(2014) yang menyatakan belanja daerah berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemda.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaporan keuangan pada *website* pemerintah daerah. Artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar maka akan mendorong pemerintah daerah untuk melaporkan informasi keuangannya pada *website* resmi pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah (*size*) memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan pada *website* pemerintah daerah. Artinya ukuran pemda yang besar akan mendorong pemda tersebut untuk mengungkapkan informasi keuangannya di *website* pemerintah daerah. Kompleksitas pemerintahan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan pada

website pemerintah daerah. Artinya kompleksitas pemerintahan tidak mendorong kepada daerah untuk meningkatkan pengungkapan informasi keuangannya di *website*. Belanja daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan di *website* pemerintah daerah. Artinya Hasil analisis ini menunjukkan bahwa tingkat pelayanan yang tinggi tidak secara otomatis akan membuat pemda untuk mengungkapkan informasi keuangannya di *website*.

Saran

Beberapa keterbatasan mempengaruhi hasil penelitian dan perlu menjadi bahan pengembangan pada penelitian selanjutnya. Saran-saran yang dapat disampaikan berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagi pemerintah daerah diharapkan untuk meningkatkan pelaporan keuangan, dengan mempublikasikan laporan keuangan di *website* resminya agar tercipta transparansi antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Bagi penelitian selanjutnya dapat menambahkan populasi penelitian yang lebih luas

dan menambahkan variabel lain yang diduga memiliki pengaruh terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui internet, seperti kompetisi politik dan lainnya.

internet for users. Edinburgh: Institute of Chartered Accountants of Scotland.

Daftar Pustaka

Agustin, Henri. 2014. Publikasi Dokumen Pengelolaan Anggaran Pada Website Pemkab/Pemkot di Propinsi Sumatera Barat. Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI)

Afriansyah, Rahmat Dian. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet oleh Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 2 No.3 Tahun 2013. Halaman 1.

Aliyah, Siti & Nahar, Aida. 2012. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Akseibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi & Auditing*. Vol.8 No.2 Mei 2012.

Baber, W. R. (1983). Towards understanding of the role of auditing in the public sector. *Journal of Accounting and Economics* 5 (3), 213-227.

Beattie, V., & Pratt, K. (2001). *Business reporting: Harnessing the power of the*

- Badan Pemeriksa Keuangan. (2009). Pokok-pokok ikhtisar hasil pemerintahan badan pemeriksa keuangan semester I Tahun 2009. Daerah. *Cahaya Aktiva*. No.02, No.02, September: Anempiricalinvestor.com, 2012.
- Christiaens, J., (1999). *Financial accounting reform in Indonesia: An empirical investigation of Financial Accountability and Management* 15 (1), 21–40.
- Gujarati, D. N. (2003). *Basic econometrics*. New York: Mc Graw Hill.
- Gupta, B., Gupta, A., & Dasgupta, S. (2008). Adoption of ICT in a government developing country: An empirical study. *Journal of Strategic Information Systems*, 140-154.
- Jaya, Jeckly Dharma dan Sisdyani, Eka Ardhani. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal pada Kelengkapan Pengungkapan Informasi Keuangan Daerah melalui Situs Resmi Pemerintah Rrovinsi. *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 9.2 : 285-303.
- Kusuma, Marhaendra. 2012. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Transparansi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Cahaya Aktiva*. No.02, No.02, September: Anempiricalinvestor.com, 2012.
- Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2005). Determinants of

- voluntary internet financial reporting by local government authorities. *Journal of Accounting and Public Policy* Vol 24, 101-121.
- Liestiani, A. (2008). Pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia untuk tahun anggaran 2006. *Skripsi Sarjana FEUI*.
- Martani, Dwi.,Fitriasari, Debby., & Annisa. 2013. Transparansi Keuangan dan Kinerja Pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Proceeding PESAT*. Vol. 5 Oktober 2013.
- Medina, Febri. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah Indonesia. *Skripsi Sarjana (Online)*. (<http://lontar.ui.ac.id>, diakses 18 Desember 2014).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008. Pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7A Tahun 2007. (2007). Tatacara penyampaian informasi dan tanggapan atau saran dari masyarakat atas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008. Pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7A Tahun 2007. (2007). Tatacara penyampaian informasi dan tanggapan atau saran dari masyarakat atas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- Pratama, Kadek Aris Dwi., Werastuti, Desak Nyoman Sri., & Sujana, Edi. 2015. Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, dan Belanja Daerah terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol.3 No.1 Tahun 2015.
- Puspita, Rora. (2010). Pengaruh Kinerja, Ketergantungan, dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Pada Situs Pemda Tahun 2010. *Skripsi Sarjana. FEUI: Depok*. Reddick, C. G. (2004). A two stage model of e-government growth: Theories and empirical evidence for U.S. cities. *Government Information Quarterly* Vol 21, 51-64.
- Puspita, Rora dan Martani, Dwi. 2010. Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemerintah daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam Website Pemerintah daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin 20-23 September 2012.
- Ratmono, Dwi. 2013. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet: Pengujian Teori Institusional dan Keagenan. *Media Ilmiah Akuntansi*. Vol. 1 No. 2 September 2013.
- Robbins, W. A., & Austin, K. R. (1987). Disclosure quality in governmental financial reports: An assessment of the appropriateness of a compound measure. *Journal of Accounting Research* Vol 24, 412-421.
- Setyaningrum, Dyah dan Syafitri, Febriyani. 2012. Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Volume 9 Nomor 2.
- Sinaga, Yurisca F. & Prabowo, Tri Jatmiko W. 2011. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah. *Jurnal Universitas Diponegoro*. Tersedia pada <http://www.eprints.undip.ac.id/28576/1.pdf>. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2015.
- Sekaran, U. (2003). *Research method for business: A skill-building approach* 4th ed. John Willey & Sons Inc.
- Standar akuntansi pemerintahan. (2005). Jakarta: Sinar Grafika.
- Soepriyanto, Gatot dan Aristiani, Restia. 2011. Evaluasi Pengungkapan Laporan Keuangan Daerah di Situs Internet. *Binus Business*

- Review*. Vol. 2 No. 1 Mei 2011:192-201
- Sofia, Alfira & Husen, Bagus. 2013. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah melalui Pengungkapan Informasi Pada Website. *Jurnal Manajemen Indonesia*. Vol.12 No.4. April 2013
- Styles, Alan K., Mack Tennyson. (2007). The Accessibility of Financial Reporting U.S. Municipalities on The Internet. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 19 (1), 56-92.
- Trisnawati, Mya Dewi & Komarudin, Achmad. 2014. Determinan publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet. *Jurnal Brawijaya*. Tersedia pada <http://www.multipara.digma.lecture.ub.ac.id/files/2014/09/149.pdf>. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2015
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi keuangan.
- West, D. M. (2005). *Digital government, technology, and public sector performance*. Princeton NJ: Princeton University Press.
- Xiao, J. Z., Yang, H., & Chouw, C. W. (2004). The Determinants and Characteristics of Voluntary Internet-based disclosures by listed Chinese Companies. *Journal of Accounting and Public Policy* Vol 23, 191-225.
- Zimmerman, L. J. (1977). The municipal accounting maze: An analysis of political incentives. *Journal of Accounting Research* Vol 15, 107-144.